

Etika Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat

Hikmah Muhaimin¹, Wahyu Ichwan², Resi Abdul Basith³, Daffa Riski Veryanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Majapahit

Corresponding Author: Hikmahmuhaimin@gmail.com

Kata Kunci:

Etika Pemerintahan;
Pelayanan Publik;
Kepercayaan;

Abstrak: Etika pemerintah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Artikel ini menganalisis peran etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan fokus pada kata kunci "etika", "pemerintahan", dan "pelayanan publik". Melalui kebijakan yang adil, regulasi yang ketat, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membangun fondasi etis yang kuat untuk layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, etika pemerintahan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Keyword:

Ethics; Public Service
Trust.

Abstract: Ethics plays a central role for government in improving the quality and public trust in public service delivery. This article analyzes the role of government ethics in public service by focusing on the keywords "ethics", "government", and "public service". Through fair policies, strict regulations, transparency and public participation, the government can build a strong ethical foundation for quality and trustworthy public services. Measures such as infrastructure improvements, employee training, and utilization of information technology are also important in achieving this goal. Thus, government ethics is an important foundation in improving the quality and public trust in public services.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya merupakan salah satu tujuan utama pemerintah yang bertanggung jawab. Etika pemerintahan memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan layanan publik yang efektif, efisien, adil, dan transparan. Dalam konteks ini, penelitian ini membahas peran penting etika pemerintahan dalam peningkatan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Achmad, N. (2018). Implementasi Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik di Indonesia.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran yang kompleks dalam penyelenggaraan layanan publik. Undang-undang menjadi instrumen yang mengatur tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan layanan publik,

termasuk keadilan, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam undang-undang ini, etika pemerintahan diakui sebagai prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Undang-undang ini juga menegaskan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Etika pemerintahan yang baik melibatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat kualitas dan kepercayaan terhadap layanan publik.

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini masih terlihat dari masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Prosedur tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan.

Permasalahan berkaitan pelayanan yang diutarakan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi sebab dampak kedepan bisa jadi membuat trauma masyarakat untuk berdekatan dan berurusan dengan aparat pemerintahan sehingga mendapatkan cap negatif sebagai pengrusak citra, rendahnya wibawa serta kredibilitas buruk untuk aparat pemerintahan sebagai pelayanan yang mengabdikan negara dan masyarakat. Etika serta moralitas yang baik harus dijunjung tinggi oleh semua aparatur sehingga hadir penghormatan dari masyarakat untuk abdi negara yang menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat. Dengan melihat kenyataan tersebut maka muncul sebuah pertanyaan mengenai sejauhmana penerapan etika pemerintahan dalam pelayanan publik bagaimana etika pemerintahan mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan public tujuan utama untuk menggali dan menjelaskan peran penting etika pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam artikel ini antara lain: Menyoroti pentingnya penerapan etika pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan public, Memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memprioritaskan kepentingan publik dan Menghasilkan pelayanan yang adil, efisien, dan bermartabat bagi masyarakat, Menjelaskan peran undang-undang dalam mengatur penyelenggaraan layanan public, Menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengakses dan memperoleh layanan publik. Dan juga Menyediakan dasar hukum untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan public, Mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, Menyusun kebijakan dan pedoman yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dan juga Melakukan investasi dalam infrastruktur, pelatihan pegawai publik,

dan teknologi informasi yang mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik, Membangun pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat, Mengedukasi masyarakat tentang peran dan manfaat partisipasi mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan layanan publik. Dan juga Membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat terkait layanan publik

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara langsung. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menyajikan tentang kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, baik dari persoalan yang terjadi ataupun perilaku, dan mengenai sebuah persepsi.

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pengamatan secara seksama, yang dideskripsikan dengan se detail-detailnya dan dengan hasil data yang konkrit dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan dokumen-dokumen yang di butuhkan. Dengan arti wawancara yang sebagai proses untuk mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan dan dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan menjelaskan maksud kedatangan atau memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mengambil sebuah bahan untuk dijadikan penelitian kepada narasumber. (Sukmadinata, 2007)

Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi responden terkait dengan etika pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan publik, seperti pejabat pemerintah, petugas layanan publik, dan masyarakat pengguna layanan. melibatkan serangkaian pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk menggali pandangan responden tentang konsep etika pemerintahan, tantangan dalam menerapkannya dalam layanan publik, manfaat yang diharapkan dari penerapan etika pemerintahan, dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan tindakan dan keputusan pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan layanan publik, penerapan etika pemerintahan menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik

I. Pentingnya Penerapan Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Meningkatkan Integritas dan Moralitas Pemerintah - Etika pemerintahan mendorong para pejabat pemerintah untuk berperilaku secara jujur, adil, dan tidak korup. - Dengan menerapkan etika pemerintahan, praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dapat dihindari. Memastikan Kualitas Layanan Publik yang Unggul - Etika pemerintahan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. - Dengan memprioritaskan kualitas dan kepuasan masyarakat, pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah - Etika pemerintahan menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. - Dengan menjunjung tinggi etika pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diperkuat.

II. Peran Undang-Undang dalam Mengatur Penyelenggaraan Layanan Publik . Kerangka Hukum yang Jelas - Undang-undang memberikan pedoman yang tegas dalam penyelenggaraan layanan publik. - Dengan adanya undang-undang yang jelas, pemerintah dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika pemerintahan.

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat - Undang-undang melindungi hak-hak masyarakat dalam mengakses dan memperoleh layanan publik. - Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat merasa aman dan yakin akan mendapatkan pelayanan yang layak.

Menegakkan Akuntabilitas dan Transparansi - Undang-undang memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan layanan publik. - Dengan menerapkan undang-undang dengan tegas, pemerintah dapat menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik.

III. Langkah-Langkah Konkret dalam Penerapan Etika Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman yang Jelas - Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan pedoman yang mengarahkan pelaksanaan etika pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. - Dokumen-dokumen ini akan menjadi panduan bagi seluruh pegawai pemerintah dalam bertindak secara etis. Investasi dalam Infrastruktur dan Pelatihan Pegawai Publik - Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur dan menyediakan pelatihan kepada pegawai publik. - Infrastruktur yang memadai dan pegawai yang terlatih akan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas layanan publik. Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif - Pemerintah perlu menerapkan

sistem yang memantau dan mengevaluasi kualitas layanan publik secara berkelanjutan. - Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

IV. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Edukasi dan Kesadaran Masyarakat - Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam penyelenggaraan layanan publik. - Masyarakat yang sadar akan peran dan manfaat partisipasi akan lebih aktif berkontribusi dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. Membuka Ruang Dialog dan Konsultasi Publik - Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan dialog dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat. - Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh masukan berharga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat - Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan Dalam melaksanakan etika pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan melalui:

Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

Pemerintah dapat bekerja sama dengan OMS dalam menyusun kebijakan, merancang program, dan memonitor pelaksanaan layanan publik.

OMS dapat memberikan masukan dan perspektif masyarakat yang beragam untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pembentukan Forum Komunitas dan Kelompok Diskusi:

Pemerintah dapat mengadakan forum komunitas dan kelompok diskusi untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan terhadap layanan publik.

Diskusi ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang kebijakan dan memecahkan masalah yang terkait dengan layanan publik.

Peningkatan Akses Informasi:

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan publik.

Melalui penyediaan informasi yang transparan dan terbuka, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Penggunaan Teknologi Digital:

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti platform daring atau aplikasi seluler, untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaporan masalah, dan pemantauan layanan publik.

Teknologi ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat, penerapan etika pemerintahan memiliki peranan yang penting. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

Menyoroti Pentingnya Penerapan Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik:

Etika pemerintahan merupakan landasan moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dengan menerapkan etika pemerintahan, pemerintah dapat menghindari praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik.

Penting untuk mengedepankan nilai-nilai seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menjelaskan Peran Undang-Undang dalam Mengatur Penyelenggaraan Layanan Publik:

Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan layanan publik memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah.

Undang-undang ini menyediakan pedoman tentang tata cara, standar, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dengan adanya undang-undang yang memadai, pemerintah dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dan menegakkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelayanan publik.

Mengidentifikasi Langkah-Langkah Konkret yang Dapat Diambil oleh Pemerintah:

Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan pedoman yang jelas untuk menerapkan etika pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Diperlukan investasi dalam infrastruktur, pelatihan pegawai publik, dan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemerintah harus melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kinerja penyelenggaraan layanan publik dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Membangun Pemahaman tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat:

Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai peran dan manfaat partisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan layanan publik.

Diperlukan pembentukan mekanisme yang memungkinkan dialog dan konsultasi publik agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, masukan, dan keluhan terkait layanan publik.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan penggunaan teknologi digital guna mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Etika pemerintahan dalam Desa Pagarluyung memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam konteks Desa Pagarluyung, penerapan etika pemerintahan dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

Integritas dan Kepedulian Terhadap Masyarakat:

Pemerintah Desa Pagarluyung harus menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Para pejabat dan aparatur desa harus bertindak jujur, adil, dan bekerja secara profesional demi kepentingan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Desa Pagarluyung perlu menerapkan praktik-praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan, program, dan kebijakan publik.

Informasi terkait anggaran, kebijakan, dan hasil pelaksanaan program harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Akuntabilitas pemerintah desa harus terjaga dengan melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan hasil kinerja kepada masyarakat.

Pelayanan Publik yang Responsif dan Berkualitas:

Pemerintah Desa Pagarluyung harus menyediakan layanan publik yang responsif, mudah diakses, dan berkualitas bagi seluruh warga masyarakat.

Proses pelayanan publik harus efisien, transparan, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan:

Desa Pagarluyung perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di tingkat desa.

Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.

Dalam menerapkan etika pemerintahan di Desa Pagarluyung, penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pagarluyung. Dalam Desa Pagarluyung,

pemerintahan memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dengan pemerintahan dalam Desa Pagarluyung:

Struktur Pemerintahan Desa:

Pemerintahan Desa Pagarluyung terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bekerja secara kolaboratif dalam mengelola administrasi dan pemerintahan desa.

Kepala desa bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan perangkat desa berperan dalam menjalankan tugas-tugas administratif.

Pelaksanaan Kebijakan Publik:

Pemerintahan Desa Pagarluyung memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik.

Kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan melalui program-program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pagarluyung.

Pengelolaan Keuangan Desa:

Pemerintahan Desa Pagarluyung memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan desa, termasuk pembentukan anggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik:

Pemerintahan Desa Pagarluyung bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur desa, seperti jalan, irigasi, sarana kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintah desa juga harus menyelenggarakan layanan publik yang mencakup pelayanan administratif, kesehatan, pendidikan, dan sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pagarluyung.

Partisipasi Masyarakat:

Pemerintahan Desa Pagarluyung perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan desa.

Melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa atau kegiatan gotong royong, masyarakat dapat berperan dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan kepentingan mereka terwakili.

Pemerintahan dalam Desa Pagarluyung harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah desa. Selain itu,

kolaborasi dengan instansi terkait, partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang efektif juga penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik

Pelayanan dalam Desa Pagarluyung merupakan aspek yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berbagai jenis layanan publik disediakan oleh pemerintahan desa guna memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai pelayanan dalam Desa Pagarluyung:

Pelayanan Administratif:

Pemerintahan Desa Pagarluyung menyediakan layanan administratif kepada masyarakat, seperti penerbitan surat keterangan, kartu identitas penduduk, izin usaha, dan dokumen-dokumen lainnya.

Layanan administratif juga mencakup pengelolaan data kependudukan, surat-menyurat, dan arsip desa.

Pelayanan Kesehatan:

Desa Pagarluyung menyediakan fasilitas dan program pelayanan kesehatan yang mencakup puskesmas desa, posyandu, pengobatan gratis, imunisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Pemerintah desa juga dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar desa.

Pelayanan Pendidikan:

Pemerintahan Desa Pagarluyung bertanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dan masyarakat desa.

Desa Pagarluyung menyediakan fasilitas pendidikan dasar, seperti sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK), serta dapat memfasilitasi akses pendidikan menengah dan nonformal di desa.

Pelayanan Sosial:

Desa Pagarluyung memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, perlindungan anak dan perempuan, penanganan bencana, dan bantuan bagi keluarga kurang mampu.

Pemerintahan desa juga dapat membentuk lembaga sosial seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau lembaga sejenis untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pelayanan Infrastruktur:

Desa Pagarluyung memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, serta pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi. Pemerintahan desa juga dapat melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur publik lainnya, seperti pasar desa, tempat ibadah, dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pelayanan dalam Desa Pagarluyung merupakan upaya pemerintahan desa untuk memberikan layanan publik yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat. Beberapa jenis pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan administratif, kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai layanan tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Layanan administratif mencakup penerbitan surat keterangan dan dokumen administratif lainnya. Pelayanan kesehatan melibatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas desa, posyandu, dan program imunisasi. Pelayanan pendidikan mencakup pendidikan dasar, menengah, dan nonformal di desa. Pelayanan sosial berfokus pada bantuan sosial, perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan bencana. Pelayanan infrastruktur mencakup pengembangan dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran irigasi, serta sarana air bersih dan sanitasi. Pemerintahan desa perlu mengimplementasikan pelayanan publik dengan prinsip efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Upaya tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait. Sumber yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Pagarluyung antara lain peraturan-peraturan yang mengatur pelayanan administratif, kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur di tingkat desa. Dengan adanya pelayanan publik yang baik, diharapkan Desa Pagarluyung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. (2018). Implementasi Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(3), 219-227.
- Sukmadinata, N. S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10. <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- Praja, D., & Pratiwi, S. (2020). Membangun Kualitas Layanan Publik Melalui Penerapan Etika Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 6(2), 173-182.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Achmad, N. (2018). Implementasi Etika Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tata Nilai dan Etika Pemerintahan di Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.